JURNAL PENELITIAN

STATUS KEWARGANEGARAAN DI PILKADA PADA BUPATI SABU RAIJUA

Andi Muhammad Salsabil

A0200120224

Abstrak

Status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore menarik perhatian banyak pihak karena diketahui memiliki paspor Amerika Serikat (AS) dan pada saat yang sama juga masih tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI). Tulisan ini membahas bagaimana status kewarganegaraan ganda Orient sebagai bupati terpilih NTT dari perspektif yuridis. Hasil pembahasan menyimpulkan, status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient Patriot Riwu Kore bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan, karena Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Akibat hukum status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient adalah yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan. Untuk itu, DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan dalam Pilkada dan sistem administrasi data kependudukan agar ke depan kasus seperti ini tidak terulang lagi. Kewarganegaraan ganda adalah status yang diberikan kepada seseorang yang merupakan warga negara yang sah secara hukum di beberapa negara. Kewarganegaraan atau kebangsaan adalah perolehan dan pelepasan status pribadi yang diatur oleh hukum nasional dan hukum internasional. Tatahan hukum nasional menjadikan status kewarganegaraan ini sebagai syarat hak dan kewajiban tertentu. Indonesia memiliki sistem hukum perdata Internasional peninggalan Belanda. Indonesia menganut asas kesesuaian status pribadi yang tercantum dalam Algeme Bepalingen Pasal 16 (AB). Status pribadi adalah suatu keadaan yang menunjukkan hubungan antara fakta-fakta mengenai orang yang bersangkutan dengan sistem hukum yang berlaku.

Pendahuluan

Latar Belakang

Warga negara diartikan sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasa disebut hamba atau kawula negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta atau anggota atau warga negara dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.

Setiap negara tidak mungkin bisa ada tanpa adanya warga atau rakyatnya. Unsur rakyat ini sangat penting dalam sebuah negara, karena secara kongkret rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Dalam kontes ini rakyat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu persamaan dan yang bersama-sama di suatu wilayah tertentu. Maka dapat dibayangkan adanya suatu negara tanpa adanya rakyat (warga negara). Rakyat (warga negara) adalah substratum personil dari negara.

Penentuan Warga Negara Republik Indonesia ditetapkan menurut persetujuan kewarganegaraan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, selanjutnya diterbitkan lagi aturan kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1946, selanjutnya diterbitkan lagi aturan kewarganegaraan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat UUD 1945, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 sebagai landasan yuridis tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 lebih menjamin HAM dan persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang terutama orang-orang asing yang tinggal di Indonesia dan menikah dengan warga negara Indonesia serta anak-anaknya.

Karena kewarganegaraan ialah hal yang ihwal dan dapat menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan Negara, yaitu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Maka bagi Indonesia, kemajemukan masyarakat ialah salah satu faktor yang sangat diperhitungkan pada saat awal berdirinya negara. Akan tetapi pada kenyataannya sekarang ini masih ada juga kendala yang menghambat terwujudnya cita-cita bangsa, meskipun hak dan kewajiban telah disamakan, tetapi tidak jarang sebagian masyarakat keturunan etnis Tionghoa yang notabene nya sebagai penduduk Indonesia mengabaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia. Pada dasarnya hanya sebagian kecil masyarakat keturunan etnis Tionghoa yang melaksanakannya.

Namun pada kenyataannya masyarakat keturunan etnis Tionghoa belum menyadari arti pentingnya status kewarganegaraan sehingga menyebabkan rasa nasionalisme dan identitas kebangsaan Indonesia mereka lemah, dan masih mempertahankan ke Tionghoan mereka dan kurang menyadari akan hak dan kewajiban mereka. Jika sudah seperti ini maka akan menimbulkan suatu masalah didalam jalannya suatu negara itu karena kurangnya kesadaran sebagian warga negaranya sebagai Warga Negara Indonesia.

Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore (Orient) diketahui berstatus warga negara Amerika Serikat (AS). Hal itu terungkap setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menerima surat balasan dari Kedubes Amerika yang membenarkan bahwa Orient adalah warga negara Amerika Serikat. Berdasarkan informasi, Orient pernah memiliki paspor negara Amerika Serikat tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang mengkaji status kewarganegaraan Orient (Kompas.com, 3 Februari 2021).¹

Terkait masalah kewarganegaraan ganda Orient, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melaporkan perihal status kewarganegaraan Orient kepada KPU Pusat. Dalam laporan tersebut,

¹ Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang mengkaji status kewarganegaraan Orient (Kompas.com, 3 Februari 2021).¹

KPU NTT menyebut Orient merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan KPU telah mengklarifikasi ke Disdukcapil Kota Kupang. Dalam berita acara klarifikasi bersama dinyatakan bahwa Orient telah tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997 (Kompas.com, 4 Februari 2021).

Menanggapi masalah kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient, Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani mengungkapkan bahwa kasus serupa pernah terjadi pada mantan pejabat publik yaitu Archandra Tahar yang ternyata sempat memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, selain soal syarat administrasi kepemiluan yang saat ini sedang ditangani KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri, kasus Orient ini makin memperjelas betapa pentingnya sinergi data dan pengaturan soal kewarganegaraan ganda bagi pemerintah (Tribunnews.com, 5 Februari 2021).²

Adanya masalah kewarganegaraan ganda terhadap bupati terpilih Orient, menarik untuk dibahas. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis status kewarganegaraan ganda Orient sebagai bupati terpilih di NTT ditinjau dari perspektif yuridis (UU Kewarganegaraan).

Rumusan Masalah

1. Status tentang kewarganegaraan status kewarganegaraan di pilkada pada bupati sabu raijua
2. Bagaimana sistem verifikasi persyaratan administratif oleh KPU ?
3. Bagaimana sistem pengawasan oleh Bawaslu ?
4. Syarat apa yang di ajukan mahkamah konstitusi kepada calon kepala daerah ?
5. Apa yang di lakukan mahkamah konstitusi untuk mengembalikan legitimasi atau dukungan rakyat ?

Metode Penelitian

-Penelitian Deskriptif

Penelitian yang menggunakan metode studi kasus biasanya memperoleh data yang dibutuhkan lewat berbagai cara, dimulai dari wawancara, observasi, ataupun pemeriksaan dokumen. Perbedaan dari metode ini dengan metode yang lainnya adalah lingkup penelitian yang lebih terbatas, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitiannya secara lebih mendalam.

Dengan beberapa narasumber dalam Menanggapi masalah kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient, Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani mengungkapkan bahwa kasus serupa pernah terjadi pada mantan pejabat publik yaitu Archandra Tahar yang ternyata sempat memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, selain soal syarat

² Christina Aryani mengungkapkan bahwa kasus serupa pernah terjadi pada mantan pejabat publik yaitu Archandra Tahar yang ternyata sempat memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat.

administrasi pemilihan yang saat ini sedang ditangani KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri, kasus Orient ini makin memperjelas betapa pentingnya sinergi data dan pengaturan soal kewarganegaraan ganda bagi pemerintah.

-Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penelitian ini yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. penelitian ini di lakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelitian di lakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran. serta mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. serta mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang terdapat dalam kasus kewarganegaraan bupati terpilih agar negara kita tercinta ini bebas dari kasus-kasus yang berkaitan dengan hal tersebut. serta mengetahui tugas dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili dalam kasus-kasus pemilu.

- Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data maksudnya adalah cara-cara yang di lakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. dalam kasus bupati sabu rajua, metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu berlandaskan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 di antaranya yaitu :

- Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal 26 ayat (1)
- Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007
- Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal 6 ayat (1) nomor 12 tahun 2006
- Undang-undang dasar negara republik indonesia pasal 7 nomor 1 tahun 2015 tentang pilkada dan undang-undang nomor 10 tahun 2016
- Undang-undang negara republik indonesia pasal 7 ayat (2)

- Teknik Analisis

Jadi, Data Analisis penelitian ini menggunakan deskriptis analitis yang di lakukan untuk menjawab masalah penelitian yang saling terkait satu dengan lainnya. setelah di lakukan pengumpulan data, di lakukan klasifikasi sesuai dengan relevansinya dengan masalah penelitian.

Pembahasan

Kronologi Pengungkapan Kewarganegaraan Ganda Orient

Masalah status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient, yaitu kewarganegaraan AS dan Indonesia menarik perhatian banyak pihak terlebih setelah Orient memenangkan Pilkada pada tahun 2020. Adapun kronologi pengungkapan status kewarganegaraan ganda Orient sebagai berikut: **Pertama**, Orient tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997 dengan NIK DKI: 0951030710640454 status dalam database sistem kependudukan pada tahun 1997 dengan alamat Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Orient mengajukan surat keterangan pindah warga negara Indonesia (SKPWNI) pada Juli 2020 dan pada bulan Agustus 2021, Dukcapil Jakarta menerbitkan SKPWNI dengan nomor: SKPWNI/3174/03082020/0083 dari Jakarta Selatan ke Kupang (Kompas. com, 6 Februari 2021).

Kedua, pada September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyurati beberapa instansi yakni KPU Kabupaten Sabu Raijua, Kepala Kantor Imigrasi Provinsi NTT terkait keabsahan dokumen syarat calon dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan permintaan data kewarganegaraannya. Bawaslu juga menyurati Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk membantu mengecek status kewarganegaraan Orient. Pada Januari 2021 Kedutaan Besar Amerika Serikat memberikan keterangan melalui email pribadi Ketua Bawaslu yang menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu adalah benar warga negara Amerika Serikat. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melaporkan kepada Bawaslu Provinsi NTT dan kepada Bawaslu RI terkait surat balasan Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut dan memastikan kebenaran Surat yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut adalah benar data dari Orient Patriot Riwu Kore (Berita Satu, 4 Februari 2021).

Terkait status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada Februari 2021 mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Dirjen Protokol dan Konsuler, Dirjen Amerika dan Eropa, Perihal informasi keabsahan surat yang menjelaskan status kewarganegaraan Orient. Selanjutnya Bawaslu mengirim surat kepada KPU RI untuk melakukan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua dan melakukan tindak lanjut atas terbitnya surat yang dikeluarkan Kedutaan Besar Amerika berdasarkan kewenangan KPU.

Perspektif Yuridis dan Upaya Penyelesaian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur warga negara dan penduduk. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

Terkait status kewarganegaraan, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) yang memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun atau sudah

menikah. Setelah itu, seseorang dapat memilih salah satu warga negara untuk menjadi kewarganegaraannya. Selama memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, anak hasil perkawinan campuran tunduk kepada dua yurisdiksi kewarganegaraan orang tua (Glery Lazuardy, 2020:44).

Berdasarkan ketentuan di atas, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau *bipatride* dan tanpa kewarganegaraan atau *apatride*. UU Kewarganegaraan mengatur status kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Dengan demikian status kewarganegaraan ganda yang dimiliki bupati terpilih Orient bertentangan dengan UU Kewarganegaraan sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan.

Sementara, apabila seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, statusnya sebagai WNI akan hilang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesiapada Pasal 31 ayat (1) huruf g dan dalam UU Kewarganegaraan pada Pasal 23 huruf h UU Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa salah satu hal yang membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Berdasarkan Pasal 23 tersebut, status kewarganegaraan Amerika Serikat yang masih dimiliki Orient akan membuat Orient kehilangan kewarganegaraan. Oleh karena itu, Orient harus melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat apabila memilih menjadi warga negara Indonesia.

Selain itu, persoalan kewarganegaraan ganda Orient menunjukkan lemahnya sistem kependudukan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem data kependudukan. Dengan demikian, permasalahan kewarganegaraan ganda bupati terpilih Orient tidak hanya soal penyelenggaraan pemilu, namun juga terkait persoalan administrasi kependudukan.

Terkait masalah kewarganegaraan ganda bupati terpilih Orient, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai (Kompas.com, 4 Februari 2021), penyelenggara pemilu baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, telah kecolongan dengan terungkapnya status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient yang ternyata berkewarganegaraan Amerika³Serikat. Doli mengatakan, kejadian tersebut harus didalami apakah memang terjadi karena ada kelalaian dari pihak penyelenggara pemilu atau ada tindak pidana penipuan yang dilakukan Orient. Oleh karena itu, Ketua Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengkaji secara mendalam sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penyelesaian permasalahan kewarganegaraan ganda Orient tersebut. Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI menyarankan agar Orient digugurkan sebagai Bupati Sabu Raijua terpilih dan menjadikan calon bupati yang meraih suara terbanyak kedua sebagai calon bupati terpilih agar tidak perlu mengulang penyelenggaraan Pilkada. Di samping itu, Ketua Komisi II DPR RI juga menyayangkan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang baru memberi penjelasan terkait kewarganegaraan Orient setelah rangkaian Pilkada tuntas (Kompas.com, 4 Februari 2021).

³ Ketua MK Anwar Usman menjelaskan hal tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Adapun upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient adalah: **Pertama**, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 huruf UU Kewarganegaraan karena Orient masih menjadi warga negara Amerika Serikat.

Kedua, Pasal 7 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada) sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient, apabila berstatus warga negara AS maka gugur dengan sendirinya. Namun UU Pilkada juga memiliki kelemahan di mana dalam Pasal 7 ayat (2) terkait persyaratan calon kepala daerah memang tidak mencantumkan secara tegas bahwa yang menjadi calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia.

Alasan MK Batalkan Bupati Orient: Status Warga Negara AS

Mahkamah Konstitusi (MK) membeberkan alasan mendiskualifikasi Orient Riwu Kore sebagai bupati terpilih Sabu Raijua, NTT. Alasan paling utama adalah Orient masih berstatus warga negara Amerika Serikat (AS). Ketua MK Anwar Usman menjelaskan hal tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, MK mengatakan, status Orient sejak 2007 adalah warga negara AS yang dibuktikan dengan kepemilikan paspor AS yang berlaku sejak 2007-2017. Kemudian, pada tahun 2017 Orient kembali membuat paspor AS yang berlaku sampai 2027.⁴

MK menegaskan status WNI Orient otomatis tidak dapat diakui. Sebab, jika mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. MK menganggap Orient tidak jujur terhadap status kewarganegaraannya selama ini. Termasuk saat melakukan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua tahun 2020. "Orient tidak pernah jujur menyangkut status kewarganegaraannya termasuk tidak mengakui status tersebut ketika mendaftar sebagai calon bupati," ucapnya lagi. Dengan gugurnya Orient, MK menyatakan pasangan calon wakil bupati Thobias Uly juga ikut gugur. Dalam perkara ini, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan paslon lawan, Taken Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja Haba terkait cacat prosedur pencalonan bupati-wakil bupati Sabu Raijua tahun 2020. Selain itu, MK menolak perkara lain yang diajukan paslon petahana Nikodemus N. Rihi Heke-Yohanis Uly Kale dan Aliaansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua. Hakim menolak gugatan pemohon lantaran dianggap tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum.

Sebelumnya, KPU Sabu Raijua menetapkan pasangan Orient Riwu Kore dan Thobias Uly sebagai bupati dan wakil bupati terpilih Sabu Raijua. Mereka meraih 21.359 suara atau 48,3 persen suara sah. Sementara pasangan penantang, Nick Rihi Heke-Yohanes Uly Kale meraih 13.292 atau 30,1 persen suara. Paslon nomor urut tiga, Takem Radja Pono dan Herman Hegi Radja meraih 9.569 suara atau 21,6 persen. Kementerian Dalam Negeri menunda pelantikannya sebanyak dua kali karena masih mendalami kasus Orient terkait status kewarganegaraannya.

⁴ Ketua MK Anwar Usman menjelaskan hal tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, MK mengatakan, status Orient sejak 2007.

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Fritz Edward Siregar, mengatakan kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan Bupati Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore, merupakan pertama kalinya selama penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. "Kami memang bertemu dengan persoalan hukum yang belum pernah terjadi selama proses Pilkada," kata dia, dalam keterangan pers dari Gedung Badan Pengawas Pemilu, Kamis 4 Februari 2021.

Peraturan hukum paling tinggi yang mengatur tentang Pilkada adalah UU Nomor 10/2016.⁵ Pada pasal 7 ayat 1 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada dikatakan bahwa kepala daerah haruslah seorang yang menyandang kewarganegaraan Indonesia. Sementara peraturan paling tinggi tentang kewarganegaraan Indonesia adalah UU Nomor 12/2006, dimana pada pasal 23 huruf h UU Nomor 12/2006 dikatakan bahwa warga negara Indonesia kehilangan hak kewarganegaraan Indonesia-nya jika memiliki kartu identitas resmi dari negara lain. Terkait alternatif pembatalan keterpilihan Riwu Kore sebagai bupati terpilih Sabu Raijua, dia mengatakan ada tiga hal yang dapat berkembang dalam diskusi. Pertama, belum ada dasar hukum bagi kepala daerah, yang sudah ditetapkan sebagai pemenang pilkada, kemudian dibatalkan keterpilihannya karena pelanggaran saat pendaftaran dan verifikasi berkas bakal calon. Kedua, apabila keterpilihan Riwu Kore sebagai bupati Sabu Raijua dibatalkan, maka akan muncul pertanyaan terkait institusi yang berwenang membatalkan. "Pertanyaan hukumnya adalah, apabila seorang calon yang sudah ditetapkan kemudian dibatalkan, lembaga mana yang berwenang untuk membatalkannya? Apakah Badan Pengawas Pemilu, KPU atau Kementerian Dalam Negeri? Itu juga persoalan hukum yang harus kami lihat," kata dia. Ketiga, dalam kasus Pilkada Sabu Raijua itu muncul pembahasan terkait siapa yang akan dibatalkan, apakah hanya bupati terpilih atau beserta wakil bupati terpilih. "Lalu, kalau ada kemungkinan dibatalkan dan ada lembaga yang berwenang membatalkan, siapa yang dibatalkan? Apakah salah satu paslon atau kedua-duanya dapat dibatalkan?" tukasnya.

Berikut ini adalah sejumlah fakta yang dihimpun Tempo terkait Bupati terpilih Sabu Raijua tersebut.

1. Orient buka suara soal kewarganegaraan

Orient Riwu Kore menegaskan bahwa ia masih berstatus WNI. Ia lahir di Kota Kupang dan bersekolah di Kupang, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Terakhir, ia menyelesaikan studi S-1 di Universitas Nusa Cendana. "Saya tidak pernah melepas status kewarganegaraan Indonesia. Walaupun saya bekerja di Amerika, masih terus bolak-balik ke Indonesia untuk lihat orang tua, keluarga dan saudara-saudara saya, baik di Kupang maupun di Sabu Raijua. Saya WNI yang sah karena NIK saya tercatat secara resmi di basis data kependudukan pada Ditjen Dukcapil," kata Orient.

Dia mengakui dirinya memang pernah memiliki paspor Amerika saat bekerja di sana. Namun ketika kembali ke Indonesia untuk menjadi calon kepala daerah, ia sudah memproses pencabutan status WNA. "Jadi sebetulnya sudah berproses," ujarnya. Menurut Orient Riwu Kore, ada aturan di Imigrasi Amerika, jika seorang warga negara berproses menjadi pejabat publik, politik atau angkatan bersenjata di negara lain, maka secara otomatis kewarganegaraan

⁵ Peraturan hukum paling tinggi yang mengatur tentang Pilkada adalah UU Nomor 10/2016.

Amerika-nya gugur. Menurut Orient Riwu Kore, ada aturan di Imigrasi Amerika, jika seorang warga negara berproses menjadi pejabat publik, politik atau angkatan bersenjata di negara lain, maka secara otomatis kewarganegaraan Amerika-nya gugur.

2. Alasan Orient ikut Pilkada

Orient Riwu Kore mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Ia menyebut tujuannya terlibat dalam Pilkada 2020 ialah atas permintaan orang tua. "Saya terpenggil kembali ke Sabu karena amanat orang tua untuk datang dan membangun kampung halaman," kata Orient dalam pernyataannya, Sabtu, 6 Februari 2021. Menurut Orient, orang tuanya pernah berpesan agar kembali ke Indonesia dan membangun kampung halamannya jika berhasil di luar negeri. "Saya merasa berhasil. Oleh sebab itu saatnya saya akan kembali ke Sabu Raijua dan sudah tentu saya mempersiapkan semua dokumen-dokumen, termasuk proses penyelesaian untuk pencabutan warga negara (kewarganegaraan AS) saya. Jadi saya aslinya warga negara Indonesia," kata dia.

3. Surat Bawaslu untuk Kemenkumham

Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, mengatakan, mereka telah melakukan berbagai upaya untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran Riwu Kore sejak sebelum masa penetapan pasangan calon bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua, yakni pada 23 September 2020. "Kami sudah melakukan upaya jauh hari, sebelum penetapan pasangan calon. Jadi sudah dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu Sabu Raijua dengan bersurat dan sebagainya. Namun, sampai hari ini juga belum ada jawaban," kata Abhan Kamis 4 Februari 2021.

Tidak kurang enam kali Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat resmi kepada Kantor Imigrasi Provinsi NTT, Kantor Imigrasi Kupang, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM soal kewarganegaraan Riwu Kore itu.

4. Menteri Hukum dan HAM segera terbitkan SK kehilangan kewarganegaraan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kehilangan Kewarganegaraan untuk Orient. "Secara formal, kita akan mengeluarkan SK kehilangan Kewarganegaraan kepada yang bersangkutan," kata Yasonna kepada Tempo, Senin, 8 Februari 2021.

Yasonna mengatakan, menurut UU Kewarganegaraan, Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan. Dengan Orient menjadi warga negara AS, kata politikus PDIP itu, dia telah kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia.⁶

Untuk memproses SK Kehilangan Kewarganegaraan, Yasonna menjelaskan bahwa biasanya perwakilan kedutaan besar atau konsulat jenderal menyampaikan pada Kemenkumham bahwa

⁶ Yasonna mengatakan, menurut UU Kewarganegaraan, Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan. Dengan Orient menjadi warga negara AS, kata politikus PDIP itu, dia telah kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia.

ada WNI yang menjadi warga negara asing di negara tersebut. "Kita proses pencabutan kewarganegaraannya," kata dia.

5. Mantan Rival Orient gugat ke PTUN minta hasil Pilkada dibatalkan

Mantan pasangan calon Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Takem Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba resmi mengajukan gugatan hasil Pemilu kepala daerah Sabu Raijua terkait status kewarganegaraan bupati terpilih Orient Riwu Kore. Gugatan TRP-Hegi diterima dengan nomor gugatan 212/PTUN Kupang/2021. Materi gugatan yang dipersoalkan terkait permasalahan Pilkada Sabu Raijua. "Ada dugaan dimana seorang calon kepala daerah yang telah ditetapkan jadi bupati terpilih diindikasikan adalah warga negara AS," katanya.

Mencari Jalan Keluar Polemik Kewarganegaraan Bupati Terpilih Sabu Raijua

Tim kuasa hukum Paslon 01 mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu terkait polemik kewarganegaraan Bupati terpilih Orient Riwu Kore. Meski pendaftaran gugatan sengketa pemilu sudah terlambat, tim kuasa hukum berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan kasus tersebut. Mengingat ada dugaan pelanggaran berat terkait kewarganegaraan yang baru muncul awal Februari kemaren.

"Mengajukan permohonan pembatalan Paslon nomor 2 pak Orient. Kami berharap MK bisa memberikan terobosan hukum, bisa memberikan keadilan terlepas dari kekurangan dalam permohonan kami, seperti tenggat waktu ya supaya dikesampingkan dulu. Ini sudah sama-sama diketahui merupakan satu perkara yang sangat menggugah rasa keingintahuan," ujar Adhitya Nasution selaku anggota tim kuasa hukum Paslon 1, Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Dia menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan soal selisih suara atau kemenangan Bupati terpilih Orient. Namun setelah ada klarifikasi dari Bawaslu, kata dia, pihaknya pun ingin mendapat kepastian hukum terkait dugaan pelanggaran Bupati Sabu Raijua terpilih Orient.

Tidak hanya itu, tim kuasa hukum juga meminta agar KPU segera memutuskan perkara soal dugaan kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Riwu Kore. Sehingga, jika perlu pemilu ulang bisa segera dilaksanakan. Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan penundaan pelantikan bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore, karena terbukti memalsukan data kependudukannya ketika mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020. Rekomendasi tersebut dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tertanggal Rabu, 3 Februari 2021, yang isinya meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penundaan pelantikan Riwu Kore.

"Bawaslu mengirimkan surat ke KPU, agar KPU berkoordinasi dengan Kemendagri untuk penundaan pelantikan. Informasi dari Sabu Raijua bahwa akhir masa jabatan di sana akan habis pada 17 Februari, jadi kami meminta jangan sampai dilakukan pelantikan dahulu," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Bawaslu juga meminta KPU menggunakan surat balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta bahwa Riwu Kore benar memiliki paspor Amerika Serikat sebagai dasar untuk

menindaklanjuti rekomendasi itu. Abhan menjelaskan, penundaan pelantikan sebagai opsi yang paling memungkinkan untuk dilakukan segera, sembari menunggu kepastian hukum terkait pembatalan calon bupati yang telah ditetapkan sebagai bupati terpilih.

Belum lama ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) kehilangan kewarganegaraan terhadap Orient. Menurut UU Kewarganegaraan, ujar Yasonna, Indonesia tidak mengenal dwikewarganegaraan. Dengan Orient menjadi warga negara AS, kata Yasonna, dia telah kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia.

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr John Tuba Helan mengatakan, jika Orient Riwu Kore dilantik menjadi Bupati Sabu Raijua, maka pemerintah dengan sengaja menundukkan wibawa Indonesia.

Menurut dia, kepastian status kewarganegaraan akan mengakhiri polemik yang terjadi di masyarakat. Jika masyarakat terus berpendapat, tanpa ada putusan status yang jelas, maka persoalan ini akan terus berlanjut.

"UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada diubah dengan UU No 10 Tahun 2016 itu jelas, bahwa yang menjadi calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia. Artinya kalau berstatus warga negara Amerika, maka gugur dengan sendirinya," ungkapnya.⁷

Ia mengatakan, polemik ini berawal dari tahapan pendaftaran paslon di KPU. Orient sendiri, menurut dia, tidak jujur mengungkapkan status kewarganegaraannya.

Meski demikian, saat ini, muncul pernyataan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus di beberapa media yang meminta Menteri Dalam Negeri tetap melantik Orient menjadi Bupati Sabu Raijua periode 2020-2025. Petrus juga meminta Orient menyelesaikan administrasi dengan menanggalkan status kewarganegaraan AS sesuai dengan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Sebenarnya tujuan dia ambil bagian dalam pencalonan kepala daerah di Sabu Raijua karena amanah dari orangtuanya. Terkait dengan kasus kewarganegaraannya itu, kata dia, sudah ada yang mengurus, bahkan saat ini sedang dalam proses.

Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif mengatakan, pertemuan tersebut tidak hanya dengan Orient Patriot Riwu Korea, tetapi juga melibatkan KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Sabu Raijua. "Kami tidak berbicara lebih jauh soal kewarganegaraan. Kami hanya membahas keamanan dan ketertiban di Sabu Raijua," katanya.

Sebelumnya diberitakan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima konfirmasi dari Kedutaan Besar (Kedubes) AS bahwa Orient Riwu Kore masih berstatus warga negara Amerika Serikat.

"Pihak Kedubes AS di Jakarta sudah memberikan konfirmasi dan membenarkan bahwa yang bersangkutan masih berkewarganegaraan AS," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua

⁷ UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada diubah dengan UU No 10 Tahun 2016 itu jelas, bahwa yang menjadi calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia.

Yugi Tagi Huma. Yugi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat ke Imigrasi di Kupang dan pusat untuk mencari tahu soal dugaan Calon Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Riwu Kore masih berkewarganegaraan AS.

Kesimpulan

Status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Bupati terpilih Orient mengakibatkan Orient terancam kehilangan statusnya sebagai WNI. Lebih lanjut hal tersebut dapat menyebabkan hak-hak politik Orient menjadi gugur. Karenanya Orient harus melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat apabila ingin menjadi WNI. Untuk itu, Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan revisi terhadap UU Pilkada, khususnya terkait dengan persyaratan calon kepala daerah agar ke depan masalah status kewarganegaraan ganda dalam pemilihan kepala daerah tidak terjadi lagi. Selain itu, Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran UU Kewarganegaraan khususnya terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient.

Adapun sejumlah fakta yang dihimpun Tempo terkait Bupati terpilih Sabu Raijua tersebut.

1. Orient buka suara soal kewarganegaraan

Orient Riwu Kore menegaskan bahwa ia masih berstatus WNI. Ia lahir di Kota Kupang dan bersekolah di Kupang, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Terakhir, ia menyelesaikan studi S-1 di Universitas Nusa Cendana. Dia mengakui dirinya memang pernah memiliki paspor Amerika saat bekerja di sana. Namun ketika kembali ke Indonesia untuk menjadi calon kepala daerah, ia sudah memproses pencabutan status WNA. "Jadi sebetulnya sudah berproses," ujarnya. Menurut Orient Riwu Kore, ada aturan di Imigrasi Amerika, jika seorang warga negara berproses menjadi pejabat publik, politik atau angkatan bersenjata di negara lain, maka secara otomatis kewarganegaraan Amerika-nya gugur.

2. Alasan Orient ikut Pilkada

Orient Riwu Kore mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Ia menyebut tujuannya terlibat dalam Pilkada 2020 ialah atas permintaan orang tua. "Saya terpenggil kembali ke Sabu karena amanat orang tua untuk datang dan membangun kampung halaman," kata Orient dalam pernyataannya, Sabtu, 6 Februari 2021.

3. Surat Bawaslu untuk Kemenkumham

Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, mengatakan, mereka telah melakukan berbagai upaya untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran Riwu Kore sejak sebelum masa penetapan pasangan calon bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua, yakni pada 23 September 2020.

4. Menteri Hukum dan HAM segera terbitkan SK kehilangan kewarganegaraan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kehilangan Kewarganegaraan untuk Orient. "Secara formal, kita akan mengeluarkan SK

kehilangan Kewarganegaraan kepada yang bersangkutan," kata Yasonna kepada Tempo, Senin, 8 Februari 2021.

Yasonna mengatakan, menurut UU Kewarganegaraan, Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan. Dengan Orient menjadi warga negara AS, kata politikus PDIP itu, dia telah kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia.

5. Mantan Rival Orient gugat ke PTUN minta hasil Pilkada dibatalkan

Mantan pasangan calon Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Takem Radja Pono dan Herman Hagi Radja Haba resmi mengajukan gugatan hasil Pemilu kepala daerah Sabu Raijua terkait status kewarganegaraan bupati terpilih Orient Riwu Kore.

DAFTAR PUSTAKA

- "Bupati Sabu Raijua Terpilih Ternyata WN AS, Ketua Komisi II DPR: Kecolongan", 4 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/02/04/11403181/bupati-sabu-raijua-terpilih-ternyata-wn-as-ketua-komisi-ii-dpr-kecolongan>, diakses 13 Februari 2021.
- "Bupati Sabu Raijua Orient P Riwu Kore Permintaan Maaf hingga Sorot Komisi I DPR", 5 Februari 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/05/terkini-polemik-bupati-sabu-raijua-orient-p-riwu-kore-permintaan-maaf-hingga-sorot-komisi-i-dpr>?, diakses 14 Februari 2021.
- Glery Lazuardy. 2006. "Status Kewarganegaraan N Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", Jurnal Hukum, Vol.2, No.1, September 2020.
- "Ini Kronologi Lengkap Terbongkarnya Status WNA Orient Riwu Kore", 4 Februari 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/728507/ini-kronologi-lengkap-terbongkarnya-status-wna-orient-riwu-kore>, diakses 12 Februari 2021.
- "Menyoal Status Kewarganegaraan Ganda Bupati Sabu Raijua Terpilih", 6 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/06/10454211/menyoal-status-kewarganegaraan-ganda-bupati-sabu-raijua-terpilih>?, diakses 12 Februari 2021.
- "Polemik Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua, Berstatus WNI dan Punya Paspor AS", 4 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/08112891/polemik-kewarganegaraan-bupati-sabu-raijua-berstatus-wni-dan-punya-paspor-as>?, diakses 10 Februari 2021.